

Pengaruh Jumlah Kasus Pembunuhan, Pencurian, Korupsi, dan PDRB ADHK terhadap Penanaman Modal Asing di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2021-2025

Lora Hardiwiyan¹, Dea Agnia², Sulian Rafli³, Putri Riskikasari⁴, Ratu Eva Febriani⁵

¹ Universitas Bengkulu dan lorahardiwiyan180@gmail.com

² Universitas Bengkulu dan deaagnia@gmail.com

³ Universitas Bengkulu dan sulianrafli06@gmail.com

⁴ Universitas Bengkulu dan riskikasariptirii@gmail.com

⁵ Universitas Bengkulu dan ratuevafebriani@unib.ac

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah kasus pembunuhan, pencurian, korupsi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) pada 34 provinsi di Indonesia periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kriminal Indonesia, dan Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel pencurian dan PDRB ADHK berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA, sedangkan variabel pembunuhan dan korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap PMA. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PMA. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9236 menunjukkan bahwa 92,36% variasi PMA dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi yang tercermin melalui PDRB ADHK memiliki peran yang lebih dominan dalam menarik investasi asing dibandingkan faktor kriminalitas dan korupsi. Oleh karena itu, upaya peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan penguatan daya saing wilayah perlu menjadi fokus utama dalam mendorong masuknya investasi asing di Indonesia.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, Kriminalitas, Korupsi, PDRB ADHK, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of homicide, theft, corruption, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant prices on Foreign Direct Investment (FDI) across 34 provinces in Indonesia during the 2021–2025 period. The study employs a quantitative approach using panel data regression analysis. Secondary data were obtained from Statistics Indonesia (BPS), Indonesian Criminal Statistics, and the Ministry of Investment/Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). Based on the Chow and Hausman test results, the Fixed Effects Model (FEM) was selected as the most appropriate model. The findings reveal that, partially, theft and GRDP at constant prices have a positive and significant effect on FDI, while homicide and corruption do not significantly affect FDI. Simultaneously, all independent variables significantly influence FDI. The coefficient of determination (R^2) of 0.9236 indicates that 92.36% of the variation in FDI can be explained by the variables included in the model. These findings suggest that economic factors, as reflected by GRDP at constant prices, play a more dominant role in attracting foreign investment than crime and corruption factors. Therefore, efforts to enhance regional economic activity and strengthen regional competitiveness should be prioritized to encourage greater inflows of foreign investment in Indonesia.

Keywords: Foreign Direct Investment (FDI), Crime, Corruption, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Indonesia

PENDAHULUAN

Penanaman modal asing (PMA) memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas produksi nasional. Pada 2025, realisasi PMA mencapai Rp900,9 triliun,

melebihi target nasional 101,3% dengan dominasi dari Singapura, meskipun fluktuasi kuartalan menunjukkan kerentanan terhadap faktor eksternal (Kementerian Investasi/BKPM, 2026). Namun, di tingkat provinsi, disparitas PMA antar 34 provinsi dipengaruhi oleh keamanan, korupsi, dan kondisi ekonomi lokal, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk mengoptimalkan distribusi investasi.

PMA bukan hanya sumber modal, tetapi juga katalisator industrialisasi dan ekspor, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional sekitar 20-25% dalam dekade terakhir. Tren 2025 menunjukkan kenaikan tipis 0,1% secara keseluruhan, didorong sektor manufaktur dan pertambangan, tetapi penurunan di kuartal II mengindikasikan sensitivitas terhadap gejolak global seperti suku bunga AS dan ketegangan geopolitik. Di ASEAN, Indonesia bersaing ketat dengan Vietnam dan Thailand, di mana stabilitas provinsi menjadi diferensiasi utama bagi investor asing yang mencari risiko rendah dan return tinggi (Wulandari & Pratiwi, 2025).

Kriminalitas seperti pembunuhan dan pencurian menciptakan persepsi risiko tinggi, meningkatkan premi asuransi, dan biaya keamanan operasional hingga 10-15% dari total investasi. Penelitian Afriyanto (2017) menemukan bahwa setiap peningkatan 10% kasus kejahatan per 100.000 penduduk menurunkan FDI hingga 0,95%, dengan efek lebih kuat pada kejahatan kekerasan seperti pembunuhan dibandingkan pencurian properti. Di Indonesia, premanisme dan vandalisme di provinsi rawan seperti Papua atau Sulawesi memperburuk iklim, menyebabkan investor memilih klaster Jawa yang relatif aman.

Lebih lanjut, persepsi risiko keamanan ini tidak hanya dibentuk oleh jumlah kejahatan, tetapi juga oleh kapasitas aparat dalam merespons insiden. Disparitas efektivitas penegakan hukum terlihat jelas pada fluktuasi persentase tingkat penyelesaian tindak pidana (*crime clearance rate*) oleh Kepolisian Daerah (Polda) di 34 provinsi selama periode 2022–2023 (Bps, 2024). Ketimpangan penyelesaian kasus antarprovinsi ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum dan jaminan perlindungan aset bagi investor asing belum merata secara nasional, sehingga memengaruhi keputusan lokasi alokasi PMA.

Kasus spesifik seperti peningkatan pembunuhan berulang di wilayah tertentu tidak hanya menakutkan eksekutif asing, tetapi juga memicu penarikan modal jangka pendek, sebagaimana terlihat pada fluktuasi FDI pasca-insiden besar (Garriga & Phillips, 2022).

Korupsi merusak kepercayaan investor melalui praktik suap, penundaan perizinan, dan ketidakadilan hukum, dengan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia yang stagnan di bawah 40/100 memperlemah daya saing (Kennedy, 2018). Studi Christianingrum (2023) dan Fathni et al. (2023) konsisten menunjukkan hubungan negatif signifikan antara korupsi dan PMA, di mana penurunan CPI satu poin berpotensi mengurangi FDI hingga 1-2% di tingkat provinsi. Di ASEAN-5, korupsi bahkan lebih destruktif daripada inflasi, karena menciptakan "biaya tak resmi" yang tak terukur dan menghalangi reformasi struktural (Karim & Karim, 2018).

PDRB ADHK (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan) mengukur pertumbuhan ekonomi riil provinsi, menjadi indikator utama ukuran pasar dan infrastruktur yang menarik PMA (Yohanna & Suyanto, 2022). Provinsi dengan PDRB ADHK tinggi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat menyerap 60% PMA nasional, karena mencerminkan permintaan konsumen kuat dan rantai pasok matang. Variabel ini berfungsi sebagai kontrol positif dalam model ekonometrik, mengimbangi efek negatif kriminalitas, meskipun disparitas antarprovinsi (rasio 1:10 antara tertinggi dan terendah) menekankan urgensi pemerataan.

Literatur existing banyak membahas kriminalitas agregat atau korupsi nasional terhadap FDI, seperti Garriga dan Phillips (2022) di Meksiko atau Boamah dan Ofori-Yeboah (2023) di emerging economies, tetapi jarang mengintegrasikan variabel spesifik (pembunuhan, pencurian, korupsi) dengan PDRB ADHK pada level 34 provinsi Indonesia. Penelitian lokal seperti Juliawan dan Sapriyadi (2024) menemukan kriminalitas tidak selalu signifikan secara parsial, menciptakan inkonsistensi yang perlu diverifikasi dengan data panel terkini. Studi ini mengisi gap tersebut melalui analisis regresi spasial, memberikan rekomendasi kebijakan seperti penguatan Polri provinsi dan digitalisasi anti-korupsi untuk optimalisasi PMA merata.

LANDASAN TEORI

A. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI) merupakan investasi yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah asing ke suatu negara untuk memperoleh keuntungan serta pengendalian terhadap aktivitas usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Dalam teori Eclectic Paradigm yang dikemukakan oleh Dunning (1979), keputusan investor asing dalam melakukan investasi dipengaruhi oleh tiga keunggulan utama yaitu ownership advantage, location advantage, dan internalization advantage. Salah satu faktor penting dalam location advantage adalah kondisi keamanan, stabilitas ekonomi, kualitas institusi, dan ukuran pasar suatu wilayah. Semakin baik kondisi suatu daerah, maka semakin besar peluang daerah tersebut menarik investasi asing (Dunning, 1979).

B. Jumlah Kasus Pembunuhan

Kasus pembunuhan merupakan salah satu bentuk kriminalitas berat yang mencerminkan rendahnya tingkat keamanan dan stabilitas sosial suatu wilayah. Dalam teori investasi, keamanan menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Tingginya tingkat kriminalitas dapat meningkatkan risiko usaha, biaya keamanan, serta ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi.

Menurut Becker (1968) dalam Economic Theory of Crime, tindakan kriminal dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu efisiensi pasar. Tingginya kasus pembunuhan dapat menurunkan daya tarik investasi karena investor cenderung memilih wilayah yang memiliki keamanan dan stabilitas sosial yang baik. Dengan demikian, peningkatan jumlah kasus pembunuhan diduga berpengaruh negatif terhadap masuknya Penanaman Modal Asing.

C. Jumlah Kasus Pencurian

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang atau aset milik orang lain secara melawan hukum. Tingginya jumlah kasus pencurian menunjukkan lemahnya keamanan

dan perlindungan terhadap aset ekonomi di suatu wilayah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan akibat kebutuhan pengamanan tambahan serta meningkatkan risiko kerugian usaha.

Menurut teori ekonomi regional, investor akan memilih lokasi investasi yang mampu memberikan rasa aman dan efisiensi biaya produksi. Tingginya tingkat pencurian dapat menghambat aktivitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah kasus pencurian maka potensi masuknya PMA cenderung mengalami penurunan (Todaro & Smith, 2011).

D. Korupsi

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Dalam perspektif institutional theory, kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tingginya tingkat korupsi dapat menyebabkan inefisiensi birokrasi, rendahnya transparansi, meningkatnya biaya transaksi, dan lemahnya kepastian hukum.

Menurut Klitgaard (1988), korupsi muncul akibat adanya monopoli kekuasaan dan lemahnya akuntabilitas. Korupsi dapat menghambat investasi karena investor harus mengeluarkan biaya tambahan di luar biaya resmi sehingga meningkatkan ketidakpastian usaha. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat korupsi maka minat investor asing untuk menanamkan modal cenderung menurun.

E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi riil suatu daerah tanpa dipengaruhi perubahan harga. PDRB ADHK mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi, kapasitas produksi, serta ukuran pasar suatu wilayah.

Dalam teori market size hypothesis, investor asing cenderung tertarik pada daerah yang memiliki ukuran pasar besar karena dianggap mampu memberikan peluang keuntungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, maka semakin besar pula potensi permintaan barang dan jasa sehingga meningkatkan daya tarik investasi (Todaro & Smith, 2011). Dengan demikian, peningkatan PDRB ADHK diduga berpengaruh positif terhadap Penanaman Modal Asing.

F. Penelitian Terdahulu

Tingkat kriminalitas suatu wilayah telah lama diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan investor asing dalam menempatkan modalnya. Bukti empiris dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kriminalitas berpengaruh negatif terhadap arus masuk PMA. Pada 31 provinsi di Indonesia selama periode 2005–2015, peningkatan total kejahatan sebesar sepuluh persen terbukti menyebabkan PMA turun

sekitar 0,95 persen, yang menegaskan bahwa kondisi keamanan merupakan pertimbangan nyata bagi investor asing (Afriyanto, 2017). Hal yang sama ditemukan pada kajian lintas negara di kawasan ASEAN, di mana tingkat kriminalitas bersama ketidakstabilan politik terbukti menghambat masuknya investasi asing (Wardani, 2024). Dalam skala yang berbeda, penelitian di Meksiko juga memperlihatkan bahwa bertambahnya kelompok kriminal terorganisir secara konsisten menurunkan investasi asing akibat meningkatnya ketidakpastian dan risiko operasional (Garriga & Phillips, 2023). Boamah, Ofori-Yeboah, dan Owusu-Ansah (2023) memperluas argumen ini dengan menunjukkan bahwa kriminalitas tidak hanya menekan investasi secara langsung, tetapi juga memaksa perusahaan mengalihkan sumber daya ke pengeluaran keamanan yang tidak produktif.

Meskipun begitu, tidak semua penelitian menghasilkan temuan yang sejalan. Kajian terhadap investasi di Indonesia periode 2009–2022 menemukan bahwa angka kriminalitas tidak berpengaruh signifikan, sementara indeks persepsi korupsi justru menjadi variabel yang lebih menentukan (Juliawan & Sapriyadi, 2024). Perbedaan ini kemungkinan besar muncul karena perbedaan cara pengukuran kriminalitas yang digunakan—antara angka kejahatan agregat dan indeks persepsi keamanan—serta perbedaan cakupan wilayah dan periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kriminalitas dan PMA bersifat kondisional dan sangat dipengaruhi oleh pilihan variabel serta metode yang diterapkan.

Korupsi merupakan variabel yang paling banyak dikaji dalam literatur mengenai faktor penentu PMA, dan sebagian besar penelitian menemukan pengaruh negatifnya. Korupsi dinilai meningkatkan biaya transaksi dan ketidakpastian usaha sehingga investor asing cenderung menghindari wilayah dengan tingkat korupsi yang tinggi (Kennedy, 2018). Temuan ini dikonfirmasi oleh sejumlah penelitian di Indonesia maupun kawasan ASEAN; korupsi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PMA, baik pada tingkat nasional maupun antarnegara (Fathni, Priyana & Primadhany, 2023; Royali & Awalia, 2024; Karim & Karim, 2019). Secara lebih spesifik, korupsi skala besar ditemukan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan penurunan investasi asing dibandingkan korupsi kecil-kecilan, yang mengindikasikan bahwa investor asing lebih peka terhadap praktik korupsi yang melibatkan kebijakan dan regulasi (Emirzal dkk., 2023). Christianingrum (2023) menambahkan bahwa perbaikan sistem perizinan dan penguatan pengawasan kelembagaan merupakan jalur kebijakan yang efektif untuk memulihkan kepercayaan investor asing.

Namun, sejumlah penelitian menghasilkan temuan yang berbeda. Korupsi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap PMA, terutama dalam jangka panjang. Pada negara-negara ASEAN Plus Three, korupsi hanya terbukti menekan PMA dalam jangka pendek, sedangkan pengaruh jangka panjangnya tidak signifikan secara statistik (Kurniasih dkk., 2023). Penelitian lain di kawasan ASEAN juga tidak menemukan pengaruh signifikan indeks persepsi korupsi terhadap PMA dan justru menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif yang lebih dominan (Fadhillah,

Iranto & Herlith, 2025). Perbedaan temuan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan komposisi negara dalam sampel, metode estimasi yang digunakan, serta definisi dan sumber data indeks korupsi yang berbeda antarpenelitian. Paaïs, Nursini, dan Mustari (2024) menambahkan bahwa ketika diuji bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, hanya korupsi yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PMA, yang menunjukkan perlunya kecermatan dalam menyusun spesifikasi model agar tidak mengabaikan keterkaitan antarvariabel.

Selain kriminalitas dan korupsi, kondisi ekonomi suatu wilayah secara konsisten terbukti menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Ukuran pasar yang besar, yang diukur melalui PDB, membuat suatu negara lebih mampu menarik investasi asing dibandingkan negara dengan pasar yang lebih kecil (Karim & Karim, 2019). Di Indonesia, PDB terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PMA, yang mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik menjadi sinyal kelayakan investasi bagi investor asing (Lule & Karundeng, 2020). Pengaruh positif PDB terhadap PMA ini juga ditemukan berjalan beriringan dengan rendahnya tingkat korupsi, yang bersama-sama membentuk iklim investasi yang kondusif (Yohanna & Suyanto, 2022). Temuan-temuan ini sejalan dengan teori lokasi investasi yang menempatkan potensi pasar dan kemampuan ekonomi daerah tujuan sebagai pertimbangan utama dalam keputusan alokasi modal asing.

Faktor kelembagaan secara lebih luas juga mendapat perhatian dalam literatur investasi asing. Stabilitas politik, transparansi, dan pengendalian korupsi sebagai bagian dari kualitas kelembagaan terbukti berpengaruh positif terhadap PMA di Indonesia (Wulandari & Pratiwi, 2024). Keterbukaan perdagangan juga diidentifikasi sebagai faktor pendorong PMA yang signifikan di kawasan ASEAN, sementara ketidakstabilan politik dan kriminalitas bertindak sebagai penghambatnya (Wardani, 2024). Di samping itu, belanja pemerintah yang memadai turut mendukung iklim investasi yang lebih baik (Fadhillah dkk., 2025), dan penerapan tata kelola berbasis digital melalui e-government ditemukan dapat memperkuat daya tarik investasi asing di negara-negara ASEAN yang sedang berbenah secara kelembagaan (Royali & Awalia, 2024). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa PMA tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor, melainkan oleh kombinasi kondisi keamanan, integritas pemerintahan, kemampuan ekonomi daerah, dan kualitas tata kelola secara keseluruhan.

Meskipun penelitian mengenai faktor-faktor penentu PMA telah berkembang cukup luas, beberapa celah penting masih belum terjawab secara memadai. Penelitian terdahulu umumnya mengukur kriminalitas secara agregat, seperti total angka kejahatan atau indeks persepsi keamanan, tanpa membedakan jenis kejahatan secara spesifik. Pendekatan ini mengabaikan kemungkinan bahwa jenis kejahatan yang berbeda memiliki dampak yang berbeda pula terhadap keputusan investasi asing. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan jumlah kasus pembunuhan dan pencurian sebagai ukuran kriminalitas yang lebih terperinci, sehingga memungkinkan identifikasi pengaruh masing-masing jenis kejahatan terhadap PMA secara lebih tajam.

Dari segi unit analisis, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat nasional atau membandingkan antarnegara, termasuk di kawasan ASEAN. Penelitian yang menggunakan satuan provinsi di Indonesia masih terbatas, padahal kondisi kriminalitas, korupsi, dan iklim investasi antarprovinsi di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup besar. Penggunaan 34 provinsi sebagai unit analisis dalam penelitian ini memungkinkan identifikasi perbedaan antardaerah yang tidak dapat ditangkap oleh analisis tingkat nasional. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan PDB nasional sebagai ukuran kondisi ekonomi, sedangkan penelitian ini menggunakan PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang lebih tepat mencerminkan kemampuan ekonomi riil masing-masing provinsi dan lebih peka terhadap perbedaan antarwilayah di Indonesia.

Penelitian yang menguji pengaruh jumlah kasus pembunuhan, pencurian, korupsi, dan PDRB ADHK secara simultan terhadap PMA pada tingkat provinsi di Indonesia juga masih sangat terbatas. Sebagian besar studi hanya menggabungkan dua atau tiga variabel sekaligus, sehingga belum mampu menangkap secara menyeluruh keterkaitan antarfaktor yang memengaruhi investasi asing. Lebih jauh, penelitian ini menggunakan periode 2021–2025 yang merupakan masa pemulihan pascapandemi COVID-19, suatu periode yang ditandai oleh pergeseran pola investasi global dan pelaksanaan reformasi perizinan berusaha di Indonesia. Dinamika investasi pada periode ini berbeda secara nyata dari periode-periode yang dikaji dalam penelitian sebelumnya, sehingga temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan kebijakan investasi saat ini. Dengan mempertimbangkan seluruh celah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur investasi asing di Indonesia sekaligus memberikan masukan yang berguna bagi pengambilan kebijakan peningkatan iklim investasi di tingkat provinsi.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel untuk menganalisis pengaruh kejahatan pembunuhan, pencurian, korupsi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK terhadap investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel, yaitu gabungan antara data cross-section dan time-series. Data cross-section mencakup 34 provinsi di Indonesia, sedangkan data time-series meliputi periode tahun 2021-2025, sehingga diperoleh total 170 observasi.

Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi Statistik Kriminal Indonesia. Data PMA diperoleh dari realisasi investasi Penanaman Modal Asing menurut provinsi, data PDRB ADHK diperoleh dari publikasi resmi BPS, sedangkan data pembunuhan, pencurian, dan korupsi diperoleh dari Statistik Kriminal Indonesia.

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang diukur berdasarkan nilai realisasi investasi asing dalam satuan juta US\$. Variabel independen terdiri dari lima variabel. Pertama, pembunuhan yang diukur berdasarkan jumlah kasus pembunuhan yang tercatat pada masing-masing provinsi. Kedua, pencurian yang diukur berdasarkan jumlah kasus pencurian yang dilaporkan pada masing-masing provinsi. Ketiga, korupsi yang diukur berdasarkan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang tercatat di setiap provinsi. Keempat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan dalam satuan miliar rupiah.

C. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 10. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$PMA_{it} = \beta_0 + \beta_1 PMBit + \beta_2 PCRit + \beta_3 KORit + \beta_4 PDRBit + eit \quad (1)$$

Ket:

PMA	= Penanaman Modal Asing (Juta US\$)
PMB	= Pembunuhan (Kasus)
PCR	= Pencurian (Kasus)
KOR	= Korupsi (Kasus)
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi masing-masing variabel independen
eit	= Error term (komponen kesalahan atau variabel lain di luar model)
i	= Unit wilayah (provinsi)
t	= Periode waktu penelitian

D. Pemilihan Model

Dalam analisis data panel, terdapat tiga pendekatan model, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, uji Hausman untuk memilih antara FEM dan REM, serta uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan pilihan antara CEM dan REM.

E. Analisis Statistik

Pengujian statistik dilakukan untuk mengevaluasi model regresi yang digunakan. Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Sementara itu, uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Data Panel

1. Pemilihan Model

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	29.138875	(33,132)	0.0000
Cross-section Chi-square	359.450159	33	0.0000

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 10 (2026)

Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 0,05$), sehingga model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan Common Effect Model (CEM).

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.680457	4	0.0014

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 10 (2026)

Selanjutnya, hasil uji Hausman memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0014 ($< 0,05$), yang mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai digunakan dibandingkan Random Effect Model (REM). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model analisis.

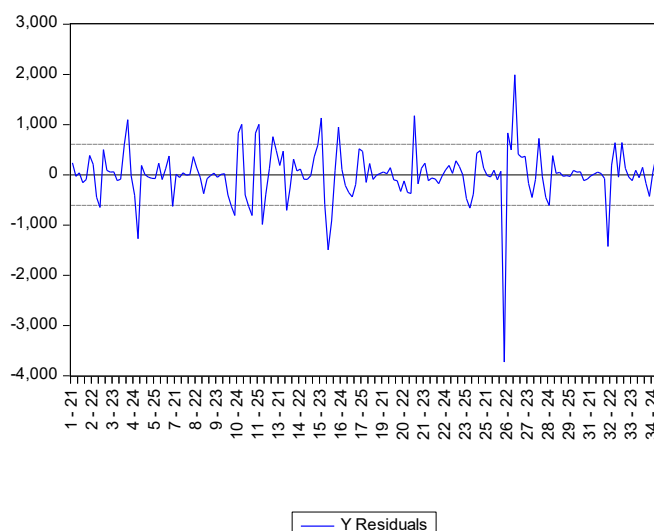
2. Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1	0.6643514912527036	0.393783018270636	0.4983968573314776
X2	0.6643514912527036	1	0.2345521728916114	0.4583290114434305
X3	0.393783018270636	0.2345521728916114	1	0.3715053140338393
X4	0.4983968573314776	0.4583290114434305	0.3715053140338393	1

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 10 (2026)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh nilai hubungan antar variable independen berada di bawah 0,80, sehingga model regresi dapat dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Dioah Menggunakan Eviews 10 (2026)

Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa distribusi residual tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak di sekitar garis nol, sehingga dapat dinyatakan bahwa model terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik.

3. Hasil Estimasi Model

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = -1039,479 + 4,227987X_1 + 0,090566X_2 - 0,390143X_3 + 0,006571X_4$$

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pembunuhan mempunyai koefisien positif sebesar 4,227987, yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah kasus pembunuhan cenderung meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA), meskipun pengaruhnya relatif kecil. Variabel pencurian mempunyai koefisien positif sebesar 0,090566, yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus pencurian cenderung meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA).

Variabel korupsi memiliki koefisien negatif sebesar -0,390143, yang mengartikan bahwa peningkatan jumlah kasus korupsi dapat menurunkan Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara itu, variabel PDRB ADHK memiliki koefisien positif sebesar 0,006571, yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB ADHK mampu meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan demikian, faktor ekonomi yang tercermin melalui PDRB ADHK memiliki hubungan positif terhadap peningkatan investasi asing selama periode penelitian.

4. Uji Parsial (t)

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (t)

C	-1039.479	408.0768	-2.547264	0.0120
X1	4.227987	5.253091	0.804857	0.4223
X2	0.090566	0.028573	3.169610	0.0019
X3	-0.390143	8.944262	-0.043619	0.9653
X4	0.006571	0.001504	4.368040	0.0000

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 10 (2026)

Hasil uji t memperlihatkan bahwa variabel pembunuhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) ($p\text{-value} > 0,05$). Variabel pencurian memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif ($p\text{-value} < 0,05$). Variabel korupsi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) ($p\text{-value} > 0,05$). Sementara itu, variabel PDRB ADHK memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif ($p\text{-value} < 0,05$). Dengan demikian, hanya variabel pencurian dan PDRB ADHK yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap Penanaman Modal Asing (PMA).

5. Uji Simultan (F)

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (F)

R-squared	0.923629
Adjusted R-squared	0.902222
S.E. of regression	607.9676
Sum squared resid	48790441
Log likelihood	-1309.436
F-statistic	43.14597
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 10 (2026)

Hasil uji F memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000 ($< 0,05$), yang mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.923629
Adjusted R-squared	0.902222
S.E. of regression	607.9676
Sum squared resid	48790441
Log likelihood	-1309.436
F-statistic	43.14597
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 10 (2026)

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,923629 mengindikasikan bahwa sekitar 92,36% variasi Penanaman Modal Asing (PMA) mampu dijelaskan oleh variabel pembunuhan, pencurian, korupsi, dan PDRB ADHK. Sementara itu, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,902222 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian, sebesar 90,22% variasi Penanaman Modal Asing (PMA) masih mampu dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

B. Pembahasan Pengaruh Pembunuhan, Pencurian, Korupsi, dan PDRB ADHK terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)

1. Pengaruh Pembunuhan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, variabel pembunuhan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4223 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di 34 provinsi Indonesia periode 2021–2025. Hasil estimasi juga menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 4,227987. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan jumlah kasus pembunuhan belum mampu memengaruhi realisasi PMA secara signifikan.

Hasil tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan Economic Theory of Crime yang dikemukakan oleh Becker (1968), yang menyatakan bahwa peningkatan kriminalitas dapat meningkatkan risiko usaha dan menurunkan minat investasi. Namun, dalam penelitian ini perbedaan tingkat pembunuhan antarprovinsi belum menjadi pertimbangan utama dalam penempatan investasi asing. Selama periode penelitian, PMA cenderung terkonsentrasi pada provinsi-provinsi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, didukung oleh besarnya PDRB, perkembangan sektor industri, serta kapasitas pasar yang lebih luas. Kondisi tersebut menyebabkan arus investasi tetap mengalir ke daerah yang memiliki daya tarik ekonomi yang kuat meskipun terdapat perbedaan tingkat pembunuhan antarwilayah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa karakteristik ekonomi daerah memiliki peran yang lebih besar dalam menarik PMA dibandingkan tingkat pembunuhan yang terjadi. Dengan demikian, peningkatan maupun penurunan jumlah kasus pembunuhan belum mampu menjelaskan perubahan PMA secara nyata pada 34 provinsi di Indonesia selama periode penelitian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Juliawan dan Sapriyadi (2024) yang menemukan bahwa kriminalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi di Indonesia. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan Afriyanto (2017) yang menyatakan bahwa kriminalitas berpengaruh negatif terhadap investasi asing.

2. Pengaruh Pencurian terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pencurian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) dengan nilai probabilitas sebesar 0,0019 ($< 0,05$) dan koefisien regresi sebesar 0,090566. Temuan ini menarik karena berbeda dengan teori investasi konvensional yang umumnya memprediksi bahwa kriminalitas akan menurunkan minat investor akibat meningkatnya risiko dan biaya usaha.

Secara teoritis, hasil tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan Agglomeration Theory yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi dan investasi cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki ukuran pasar besar, infrastruktur yang memadai, dan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi (Marshall, 1890; Krugman, 1991). Konsentrasi aktivitas ekonomi tersebut tidak hanya meningkatkan daya tarik suatu daerah bagi investor, tetapi juga dapat meningkatkan peluang terjadinya kejahatan properti karena semakin banyak aset ekonomi yang terkonsentrasi dalam suatu wilayah.

Dengan demikian, koefisien positif pencurian tidak dapat diartikan bahwa peningkatan pencurian mendorong masuknya PMA. Sebaliknya, temuan ini mengindikasikan bahwa variabel pencurian dalam penelitian ini kemungkinan lebih merefleksikan tingkat aktivitas ekonomi dibandingkan risiko investasi. Jumlah kasus pencurian yang lebih tinggi cenderung ditemukan pada daerah dengan aktivitas ekonomi dan konsentrasi investasi yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel pencurian kemungkinan turut menangkap karakteristik ekonomi daerah yang padat aktivitas dan investasi, sehingga koefisien positif yang diperoleh lebih mencerminkan efek aglomerasi ekonomi daripada pengaruh kausal pencurian terhadap PMA. Oleh

karena itu, hubungan positif yang ditemukan lebih menggambarkan karakteristik ekonomi daerah tujuan investasi dibandingkan pengaruh langsung pencurian terhadap keputusan investor asing.

Temuan ini menunjukkan bahwa investor asing di Indonesia periode 2021–2025 cenderung lebih mempertimbangkan faktor fundamental ekonomi, seperti ukuran pasar dan potensi keuntungan, dibandingkan tingkat pencurian dalam menentukan lokasi investasi. Namun demikian, hasil ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena variabel pencurian masih diukur menggunakan jumlah kasus absolut, sehingga kemungkinan turut merefleksikan perbedaan ukuran populasi dan aktivitas ekonomi antarprovinsi. Dengan demikian, hubungan positif yang ditemukan tidak menunjukkan bahwa pencurian meningkatkan PMA, melainkan mengindikasikan adanya keterkaitan antara konsentrasi aktivitas ekonomi, investasi, dan jumlah kasus pencurian pada wilayah-wilayah tertentu.

3. Pengaruh Korupsi terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, variabel korupsi memiliki koefisien regresi negatif sebesar $-0,390143$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,9653$ ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di 34 provinsi Indonesia periode 2021–2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa korupsi memiliki arah hubungan negatif terhadap PMA, namun hubungan tersebut belum mampu menjelaskan variasi PMA secara nyata.

Arah hubungan negatif tersebut sejalan dengan Institutional Theory yang menyatakan bahwa kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tingginya tingkat korupsi dapat meningkatkan biaya transaksi, menurunkan kepastian hukum, serta menciptakan inefisiensi birokrasi yang berpotensi mengurangi daya tarik investasi suatu daerah.

Meskipun demikian, tidak signifikannya pengaruh korupsi mengindikasikan bahwa perbedaan jumlah kasus korupsi antarprovinsi belum menjadi faktor utama dalam menentukan distribusi PMA di Indonesia. Selama periode penelitian, investasi asing cenderung terkonsentrasi pada daerah dengan skala ekonomi yang besar, yang ditunjukkan oleh tingginya aktivitas produksi, kapasitas pasar, dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi daerah masih memiliki peran yang lebih dominan dalam menarik investasi dibandingkan tingkat korupsi yang tercatat.

Dengan demikian, meskipun korupsi berpotensi menurunkan daya tarik investasi, pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk memengaruhi keputusan investasi asing secara nyata pada 34 provinsi di Indonesia selama periode penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fadhillah dkk. (2025) serta Kurniasih dkk. (2023) yang menemukan bahwa korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap PMA. Namun, hasil ini berbeda dengan Christianingrum (2023), Kennedy (2018), serta Karim dan Karim (2019) yang menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing.

4. Pengaruh PDRB ADHK terhadap Penanaman Modal Asing (PMA)

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, variabel PDRB ADHK memiliki nilai probabilitas sebesar $0,0000$ ($< 0,05$) dan koefisien regresi sebesar $0,006571$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di 34 provinsi Indonesia periode 2021–2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB ADHK di suatu daerah diikuti oleh peningkatan realisasi PMA.

Hasil ini sejalan dengan Market Size Hypothesis yang menyatakan bahwa investor cenderung memilih wilayah dengan ukuran pasar yang besar dan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. PDRB ADHK mencerminkan kapasitas produksi, ukuran pasar, serta tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB ADHK, semakin besar pula peluang pasar dan aktivitas ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh investor untuk memperoleh keuntungan.

Selain itu, provinsi dengan PDRB ADHK yang tinggi umumnya didukung oleh infrastruktur yang lebih baik, jaringan industri yang lebih berkembang, serta daya beli masyarakat yang lebih kuat. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik investasi karena dapat mendukung efisiensi produksi dan memperluas peluang pemasaran. Oleh karena itu, wilayah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi cenderung menjadi tujuan utama PMA di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menarik investasi asing. Semakin tinggi tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah, semakin besar pula kemampuannya dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung masuknya PMA.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yohanna dan Suyanto (2022), Lule dan Karundeng (2020), serta Karim dan Karim (2019) yang menyatakan bahwa ukuran pasar dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap investasi asing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel terhadap 34 provinsi di Indonesia periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa variabel pencurian dan PDRB ADHK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara itu, variabel pembunuhan dan korupsi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PMA. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan investor asing lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi daerah dibandingkan tingkat kriminalitas dan korupsi yang tercatat.

PDRB ADHK terbukti menjadi faktor yang paling konsisten dalam mendorong masuknya investasi asing karena mencerminkan ukuran pasar, kapasitas produksi, dan tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah. Di sisi lain, hubungan positif antara pencurian dan PMA tidak dapat diartikan sebagai pengaruh kausal, melainkan mengindikasikan bahwa daerah dengan aktivitas ekonomi dan investasi yang tinggi cenderung memiliki jumlah kasus pencurian yang lebih besar. Oleh karena itu, variabel pencurian dalam penelitian ini lebih merefleksikan konsentrasi aktivitas ekonomi dibandingkan risiko investasi.

Secara simultan, variabel pembunuhan, pencurian, korupsi, dan PDRB ADHK berpengaruh signifikan terhadap PMA dengan kemampuan penjelasan model yang sangat tinggi. Hasil penelitian menegaskan bahwa karakteristik ekonomi daerah merupakan faktor utama yang menentukan distribusi PMA antarprovinsi di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan penguatan aktivitas produktif daerah berpotensi

memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan investasi asing dibandingkan hanya berfokus pada aspek kriminalitas dan korupsi.

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, masih terdapat potensi masalah endogenitas antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan kriminalitas karena hubungan keduanya dapat bersifat dua arah. Kedua, variabel kriminalitas dan korupsi masih diukur menggunakan jumlah kasus absolut sehingga belum mempertimbangkan perbedaan jumlah penduduk antarprovinsi. Ketiga, model penelitian belum mengakomodasi kemungkinan ketergantungan spasial antarwilayah maupun dinamika PMA dari waktu ke waktu. Keempat, penelitian belum melakukan uji robustness melalui spesifikasi model alternatif untuk memastikan konsistensi hasil estimasi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan indikator kriminalitas dalam bentuk crime rate per 100.000 penduduk agar lebih mencerminkan tingkat risiko keamanan yang sebenarnya. Selain itu, penggunaan pendekatan Dynamic Panel Generalized Method of Moments (GMM), Instrumental Variable (IV), atau Spatial Panel Model sangat direkomendasikan untuk mengatasi potensi endogenitas dan menangkap efek spasial antarprovinsi. Penelitian selanjutnya juga perlu melakukan berbagai uji robustness melalui penggunaan variabel alternatif, transformasi logaritma, maupun spesifikasi model yang berbeda untuk memastikan stabilitas hasil estimasi.

Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu tetap memperkuat kualitas institusi, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai faktor pendukung investasi. Namun demikian, rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian ini harus dipertimbangkan secara hati-hati mengingat keterbatasan metodologis yang masih terdapat dalam model estimasi.

REFERENSI

- Adela, H., & Aldhaeri, W. (2024). The impact of crime against a person on domestic investment in Dubai. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(2), 81. <https://doi.org/10.3390/jrfm17020081>
- Afriyanto, M. M. (2017). The impact of crime on foreign direct investment. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 189–198. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art8>
- Az Zakiyyah, N. A., Lubis, F. R. A., & Ainy, R. N. (2024). The effect of macroeconomic, institutional and corruption variables on FDI in ASEAN countries. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 5673–5685.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik kriminal 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Boamah, N. A., Ofori-Yeboah, F., & Owusu-Ansah, M. (2023). Corruption, crime and investments by firms in emerging economies. *Journal of Economic and Administrative Sciences*.
- Christianingrum, R. (2023). Korupsi dan penanaman modal asing: Perbaikan kelembagaan. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(2), 332–353.
- Dunning, J. H. (1979). Explaining changing patterns of international production: In defence of the eclectic theory. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 41(4), 269–295. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1979.tb00035.x>

- Fathni, I., Priyana, Y., & Primadhany, E. F. (2023). Empirical analysis of the relationship between corruption, law enforcement, economic growth, and foreign direct investment in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 1(2), 61–70.
- Garriga, A. C., & Phillips, B. J. (2023). Organized crime and foreign direct investment: Evidence from criminal groups in Mexico. *Journal of Conflict Resolution*, 67(9), 1675–1703. <https://doi.org/10.1177/00220027221145870>
- Juliawan, E., & Sapriyadi. (2024). Menakar dampak politik dan keamanan terhadap investasi di Indonesia. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 4(1), 31–41. <https://doi.org/10.24252/best.v4i1.47138>
- Karim, B. A., & Karim, Z. A. (2019). Corruption and foreign direct investment (FDI) in ASEAN-5: A panel evidence. *Economics and Finance in Indonesia*, 64(2), 145–156.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2026). Laporan realisasi investasi tahun 2025. Jakarta: BKPM.
- Kennedy, P. S. J. (2018). The effect of corrupt behavior on the flow of foreign direct investment to Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 3(1), 153–162.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483–499. <https://doi.org/10.1086/261763>
- Lule, B., & Karundeng, E. H. (2020). Factors that influence the inflow of foreign direct investment in Indonesia with corruption behavior as moderation variable. *Klabat Accounting Review*, 1(2), 46–63.
- Marshall, A. (1890). *Principles of economics*. London: Macmillan.
- Nurdin, A., Sartika, N. S., Dasmaran, V., & Nurbani, S. (2025). Preman politik dan pasar: Ancaman keamanan terhadap iklim investasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 354–369. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21933>
- Nwogbo, D. C., & Ighabor, P. (2025). Impact of cybercrime on foreign direct investment in Nigeria: Evidence from the Federal Capital Territory (2019–2022). *Journal of Political Discourse*, 3(1), 151–163.
- Paais, J., Nursini, & Mustari, B. (2024). Efek korupsi dan dinamika ekonomi terhadap penanaman modal asing pada anggota negara ASEAN.
- Royali, A. S., & Awalia, M. N. (2024). An analysis of institutional and economic determinants of foreign direct investment in nine ASEAN countries (2013–2019). *Journal of Business and Political Economy*, 6(2), 101–113.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Wardani, D. T. K. (2024). The effect of trade openness and political fragility on foreign direct investment. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 4(8), 455–467.
- Wei, S.-J. (1997). How taxing is corruption on international investors? (NBER Working Paper No. 6030). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w6030>
- Wulandari, A. A. A. K., & Pratiwi, I. A. M. (2025). Institutional quality and foreign direct investment in Indonesia. *International Journal of Management Research and Economics*, 3(2), 263–272. <https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v3i2.3390>
- Yohanna, C., & Suyanto. (2022). Impact of corruption on FDI inflows in Indonesia. *MediaTrend*, 17(1). <http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v17i1.17019>